HUTANG LUAR NEGERI • PENJUALAN ASET NASIONAL • TENAGA KERJA MURAH • PENGHAPUSAN SUBSIDI TDL • REVISI UU 13/2003 • PENGANGGURAN • PHK MASSAL • PENGGUSURAN • PENGHAPUSAN SUBSIDI BBM • IMPOR BERAS • PENAMBAHAN SUBSIDI MILITER • RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI • PENCEMARAN LIMBAH TAILING • PENGHAPUSAN JAMINAN KESEJAHTERAAN PEKERJA • PENGHAPUSAN KEJAHATAN KORUPSI SUHARTO • PENGABAIAN KASUS TRISAKTI • KRIMINALISASI PEREMPUAN • KEKERASAN TERHADAP ANAK • INSTRUKSI PRESIDEN NO.3/2006 • ISSUE ANTI-AUSTRALIA • ISSUE RASIAL DI MAKASSAR • PENANGKAPAN AKTIFIS PAPUA • PERLINDUNGAN TERHADAP FPI • PERDA SYARIAH ISLAM • PILKADA • AVIAN FLU • ISSUE FORMALIN • PENGHAPUSAN KEBEBASAN BERAGAMA • PENYERANGAN FISIK TERHADAP AHMADIYAH • PENEMBAKAN PETANI DI LOMBOK • PENGGUSURAN PKL • PENGHAPUSAN SUBSIDI GAS • PENJUALAN BLOK CEPU • KORUPSI BIROKRASI • KEKERASAN POLISI • PENEMPATAN MILITER DI PAPUA • PENGKAMBING HITAMAN KOMUNIS • NAIKNYA ANGKA BUNUH DIRI DI KAWASAN URBAN • NAIKNYA ANGKA PENJUALAN OBAT ANTI DEPRESAN

PLOT!
PO Box 1419 Bandung 40014
political_hooligan@yahoo.com

Plot!

Jurnal Analisa Situasi Nasional-Internasional

mei 2006 01

Mengapa Plot!

Kamus Oxford

plot /plɑt/ *n* **1** penanda (posisi) dalam sebuah peta. **2** rencana rahasia yang disusun oleh satu atau beberapa orang untuk melakukan sesuatu (yang biasanya merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum). **3** rangkaian event dalam sebuah film, novel, dsb.

plot /plɑt/ *v* **1** membuat (sebuah garis) dengan menggabungkan titik-titik dalam sebuah grafik. **2** merencanakan sesuatu (yang biasanya merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum).

---

plot /plɑt/ *n* sebuah jurnal yang dipublikasikan tidak berkala sebagai sebuah upaya membuka dialog dan komunikasi antar titik-titik (baik komunitas maupun individu) dalam mengeksplorasi perspektif-perspektif baru dalam membangun sesuatu yang terlepas dari kekuasaan hukum formal yang berpihak pada kelas penguasa maupun juga dari perspektif oposannya yang juga berorientasi pada kekuasaan negara; atau dengan kata lain ini adalah sebuah usaha untuk melangkah lebih jauh dari sekedar paradigma biner Kiri-Kanan. Ini adalah bagian kecil dari sebuah kisah besar pencarian harga diri manusia di atas peta konstelasi sistem dunia saat ini, yang telah dimulai sejak keberadaan manusia itu sendiri.

tersebut adalah juga bertalian erat dengan krisis industrial dan komersial tahun 1851. Hal tersebut dibuktikan saat Bonaparte meraih kemenangan mutlaknya.

Bab 7 yang merupakan ikhtisar dari seluruh paparan sejarah dalam bab-bab sebelumnya, tampaknya merupakan klimaks dari buku ini. Secara eksplisit, dari sejarah tersebut dapat diambil pemahaman mengenai peran negara, ideologi yang bergumul di dalamnnya, sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Salah satu konsep dasar dari teori-teori yang dikemukakan Marx memang berbicara tentang kelas, dan dalam rentetan peristiwa pasca revolusi Perancis ini kita dapat turut belajar mengenai peran tiap-tiap kelas dalam aplikasi praksisnya. Dengan kata lain, sejarah naiknya Bonaparte pada kursi kekuasaannya ini telah membenarkan teori-teori yang dikemukakan Marx. Dengan kata lain, buku setebal 140 halaman ini memang layak untuk dibaca dan dijadikan sumber acuan untuk belajar lebih jauh tentang praksis yang terjadi dari teori yang dikemukakan Marx. [ ]

MENGUKUR KAPASITAS INDIVIDU MANUSIA

Nietzsche
St. Sunardi
LKiS 1999 (Cet. ke 2), Rp. 27.000

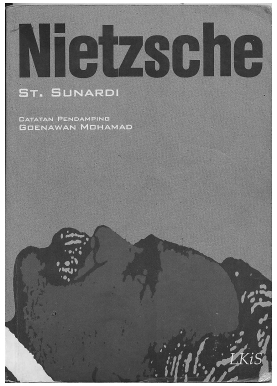

Filsuf yang hidup pada masa yang sama dengan Karl Marx ini pada masa menerbitkan karya besarnya, 'Thus Spoke Zarathustra' tidak memiliki audiens yang banyak dibandingkan dengan penerbitan buku 'Das Kapital'. Bahkan hingga kini, mereka yang terinspirasi oleh karya dua filsuf tersebut Jerman tersebut jarang sekali yang berminat pada keduanya sekaligus. Dianggap sebagai karya yang mengagungkan individualistis, nyaris seluruh karya Nietzsche tak tersentuh oleh mereka yang berusaha melarikan diri dari orde dunia lama.

Seandainya saja, kita mau memberi perhatian lebih pada karya-karya Nietzsche, maka kita akan menemukan hal-hal yang justru melengkapi pemahaman dunia yang telah diberikan oleh Marx. Apabila Marx menempatkan peran kesadaran sosial sebagai sebuah kekuatan yang mesti terjaga untuk mengubah dunia, maka Nietzsche memberi penekanan pada kapasitas individu sebagai sosok pengubah dunia. Kini bayangkan, apabila individu-individu yang memiliki kapasitas penuh sebagai manusia, berada di pihak proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Mungkin dengan hanya 100 orang, gerak sejarah dunia ini bisa berubah.

Buku karya St. Sunardi ini sebenarnya buku lama, tapi ini adalah karya penting mengingat bahwa mempelajari Nietzsche termasuk sulit. Dibagi dalam 6 bab, pokok-pokok pikiran Nietzsche dirumuskan, di antaranya tentang apa itu nihilisme dan mengapa ia harus dirangkul, untuk kemudian harus diatasi, atau dilampaui. Lalu tentang 'will to power' atau 'kehendak untuk berkuasa' yang sering disalah artikan sebagai hasrat diktatorial yang menjadi pembenaran untuk hasrat-hasrat kerakusan. Bab lainnya, berbicara mengenai übermensch. Level hidup tertinggi yang harus dicapai oleh manusia. Dalam poin ini, kita dapat mengatakan bahwa Marx adalah salah seorang yang dapat dimasukkan dalam kategori übermensch. Tak banyak orang yang menjadi übermensch, tapi sesungguhnya siapapun mampu apabila ia memahami arti dan makna hidupnya sendiri. Lalu kita juga diajak untuk menyelami pokok pikiran soal kembalinya segala sesuatu. Bahwa dunia ini adalah sebuah siklus yang terus berulang. Kembali ke Marx, menurut teori dialektika historisnya, apakah sebenarnya yang kita alami ini belum pernah terjadi sebelumnya? Tentu tidak. Segala sesuatu yang kita alami sekarang ini adalah sebuah perulangan dari sesuatu yang pernah terjadi sebelum kita ada.

Terakhir, kita disuguhi paparan singkat soal beberapa tokoh penting yang terpengaruh oleh pikiran-pikiran Nietzsche, seperti Karl Jaspers, Martin Heidegger, Michael Foucault, Jacques Derrida (yang terkenal juga karena memaparkan relevansi teori Marx di era sekarang ini) dan Muhammad Iqbal. Dengan kata lain, buku ini adalah sebuah pengantar untuk mulai memahami pokok-pokok pikiran Nietzsche, yang pada intinya berkata bahwa manusia adalah penulis sejarahnya sendiri dan dalam hal ini manusia harus memahami seluruh kapasitasnya sendiri sebagai individu. [ ]

"bagaimana mereka harus melawan" atau blablabla lainnya). Sepertinya para orator lupa, bahwa para pekerja kerah biru tersebut telah memahami hal ini dengan baik karena itulah yang mereka alami sehari-hari. Yang perlu untuk disampaikan dalam mimbar publik adalah pandangan-pandangan yang baru sehingga mimbar berubah menjadi sebuah ajang diskusi publik, bukan sekedar mimbar kontes siapa yang mampu berteriak "Lawan!" paling keras.

Revolusi adalah sesuatu yang konyol untuk dibicarakan, hal ini jelas karena gerakan revolusioner modern yang terorganisir tak mampu beranjak lebih jauh daripada sekedar mengulangi pola-pola yang sama dari tahun ke tahun. Eksplorasi taktik baru juga nyaris tak pernah terjadi semenjak nyaris seluruh organisasi revolusioner tercebur dalam kemiskinan imajinasi. Yang paling menyedihkan adalah mandegnya wacana bagi diri mereka sendiri (seperti "masyarakat kapitalisme hanya dapat diruntuhkan dengan pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat progresif"). Maka pembicaraan antar organisasi tak pernah lebih daripada sekedar organisasi mana yang memiliki pengikut fanatik lebih banyak. Apabila hal ini terjadi, maka program kerja yang terjadi juga tak pernah lebih daripada sekedar kontes yang telah disebutkan di atas tadi. Kata 'revolusi' juga telah berhasil dinetralkan hingga ke titik dimana ia mendeskripsikan sebuah perubahan yang cepat dalam produksi komoditi yang juga bergerak cepat. Hal ini terjadi karena kemungkinan perubahan yang menggairahkan tidak lagi terekspresikan dimanapun juga. Semua ini sesungguhnya adalah konfirmasi bahwa mereka—para birokrat, elit korporasi dan para pembuat kebijakan—terbukti mampu mempertahankan diri dengan baik, di segala level realitas, jauh daripada yang dapat dipahami oleh para oposannya.

Dunia telah berubah terlalu banyak, sistem ini telah dan terus menerus membangun pertahanan dirinya dengan begitu kuat dan kompleks, maka aktifitas revolusioner juga seharusnya berjalan terus seiring dengan realita. Pola dasar dunia ini dibangun di atas bentuk yang sama, bahwa ada kelas yang menindas, ada kelas yang ditindas dan dihisap demi kepentingan sang penindas. Tapi untuk menyerang sang penghisap dengan efisien dan efektif, maka kita harus mampu untuk memahami sang penghisap tersebut dengan sangat baik. Poinnya bukanlah bahwa revolusi hari ini harus lebih toleran dan kompromis, ia hanya harus memahami dan menemukan dirinya sendiri kembali, *reinvented*.

Bandung, 07 Mei 2006

Sumber akumulasi tersebut jelas bukan peredaran dalam kasus rata-rata home-industry dimana nilai akhir akan sama dengan nilai awal karena hasil produksi yang dipertukarkan memiliki nilai yang sama. Akumulasi tersebut juga bukan karena kenaikan harga, karena toh nilai yang berfungsi adalah dimana uang menempati nilai guna. Jadi jelas, bahwa dalam ekonomi kapitalis, seseorang harus mendapatkan suatu hasil produksi yang apabila digunakan dalam proses produksi akan menciptakan jumlah kapital yang lebih tinggi dari jumlah awal, dimana tujuan akhirnya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tapi untuk akumulasi kapital itu sendiri.

Lantas bagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis ini pertentangan antar kelas mendapatkan posisinya?

Dalam teori dasar soal kerja, manusia bekerja untuk menghasilkan sebuah hasil produksi. Artinya, seseorang bekerja untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilai hasil produksi atas kerja yang telah dilakukannya. Ambil contoh, seseorang (atau kita sebut saja A) yang bekerja dalam memproduksi t-shirt. A menerapkan kerja atas kain (bahan baku) dengan menggunakan mesin jahit (alat kerja) sehingga menghasilkan sebuah produk t-shirt. T-shirt ini kemudian dipertukarkan di masyarakat dengan uang sejumlah Rp.60.000,-. Maka jumlah uang yang diterima oleh A seharusnya (setelah dikurangi biaya proses produksi + proses pemasaran, katakanlah sejumlah Rp.50.000,-) adalah sejumlah Rp.10.000,-

Kini katakanlah A dalam melakukan kerja untuk menghasilkan satu buah t-shirt hanya membutuhkan waktu 15 menit. Maka apabila sehari A bekerja efektif selama 7 jam (20 x 15 menit) maka A mampu menghasilkan t-shirt sebanyak 20 buah. Dalam sebulan kerja efektif (26 hari kerja) maka A menghasilkan t-shirt sebanyak 520 buah t-shirt (26 x 20). Otomatis A berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.5.200.000 (520 x Rp.10.000,-). Apabila dalam sebuah proses produksi juga terdapat staf pemasaran, periklanan yang juga bekerja dengan jumlah jam kerja yang sama, maka jumlah uang yang diterima A dibagi sama menjadi Rp. 2.600.000,-. Masalahnya sekarang apakah pendapatan yang diterima oleh A memang sesuai dengan hasil kerjanya yang menggunakan perhitungan demikian, ataukah hanya sejumlah yang ditetapkan oleh pemilik alat produksi tanpa penjelasan apapun atas hal tersebut?

Perhitungan di atas disusun atas kesepakatan bahwa semua manusia seharusnya bekerja: tidak ada seseorang yang mendapatkan hasil lebih banyak dari yang lain apabila kerja yang dilakukan memakan jumlah waktu yang sama. Tidak ada boss yang menghabiskan waktu kerja sedikit tetapi mendapatkan jumlah yang jauh lebih besar. Seharusnya. Tapi sayangnya, di bawah sistem kapitalisme yang terjadi tidak demikian.

Dengan demikian, kini kita semua tahu bukan, siapa musuh kelas pekerja sebenarnya di bawah sistem ekonomi kapitalisme di mana ada seseorang yang atas hasil produksinya mendapatkan jumlah lebih besar tapi tidak menghabiskan waktu yang sama (atau lebih) besar daripada pekerjanya. Orang tersebut dalam masyarakat era perbudakan disebut pemilik budak, di era feodal disebut raja dan dalam era modern sekarang disebut presiden, direktur, boss, atau bahkan pemilik tempat kerjamu. [ ]

Pop Quiz 01.2

Apakah upahmu telah sesuai dengan kerja yang telah engkau lakukan selama ini?

Apakah tempat kerjamu memberimu transparansi mengenai data keuangan (output dan input) sehingga menjelaskan mengapa jumlah upahmu sebesar yang engkau terima saat ini?

Siapakah dari hubungan produksi di tempat kerjamu, yang paling diuntungkan atas terciptanya hasil produksi dimana engkau berikan tenaga dan pikiranmu?

Berapa uang yang diterima oleh bossmu atas hasil kerjamu?

Apa yang kini akan engkau lakukan?

sebelumnya, PKS juga ambil bagian dalam perayaan May Day sebagai klaim bahwa emansipasi pekerja juga bagian dalam program partai mereka). Bahkan saat Tony Blair melakukan kunjungan ke Indonesia, Aa' Gym—yang notabene para pendukungnya adalah para muslim pro-PKS—menyambutnya dengan tangan terbuka, termasuk seluruh program ekonomi neo-liberal yang menyertai kedatangannya.

Demokrasi representatif yang membawa pemerintahan-pemerintahan pasca Suharto ke dalam imaji 'demokratis' juga telah termistifikasi. Begitu juga dengan ide pemerintahan Islam, termistifikasikan di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Maka dengan demikian, aktifitas praksis demistifikasi atas keduanya harus juga berakselerasi dengan teori-teori revolusioner. Di tengah masyarakat yang teralienasi, kontrol totaliter (kuatnya jajaran kepolisian, dibentuknya jajaran Pamong Praja, dilepasnya FPI untuk bertindak apapun, diberlakukannya Perda Anti-Pelacuran di Tangerang dan Depok, didorongnya pengesahan RUU APP) dan konsumsi yang spektakular (trend gadget, merebaknya industri fashion dan pembentukan komunitas-komunitas yang berbasiskan pada kepemilikan produk—klub-klub bermotor atau komunitas game cyber) mencanangkan pengaruhnya yang kuat, tak peduli perbedaan ideologis, ras dan agama. Pertalian hubungan semua itu di tengah masyarakat tak dapat dipahami tanpa kritik yang menyeluruh, proyek-proyek yang bertujuan mentransformasikan masyarakat agar mampu mengontrol hidup dan menggariskan sejarahnya sendiri. Ini adalah tuntutan yang dibawa dalam semua revolusi yang murni, tuntutan yang hingga kini selalu dikalahkan karena para 'spesialis revolusi' selalu mengambil alih revolusi dan mengarahkannya ke dalam kepentingan ekonomi diri mereka sendiri.

Agar mampu untuk menghadirkan bagi masa ini sebuah bibit revolusi yang murni, dibutuhkan proyek dan kritik yang menyeret serta seluruh sifat radikalisme yang dimiliki gerakan-gerakan pekerja, dengan puisi dan seni kontemporer (sebagai langkah awal sebuah riset eksperimental menuju konstruksi bebas atas kehidupan harian individu), dengan realisasi filosofis (zen dan filsafat ekonomi Marxis), dengan semangat emansipasi para insurgen Papua, serta perjuangan pembebasan anti neo-liberalisme Zapatista dan Komune El Alto di Bolivia hingga barikade-barikade jalanan di Perancis dan Belarusia. Untuk melakukannya, pertama-tama adalah perlu untuk memahami dan menemukan, tanpa terjebak dengan ilusi Kiri versus Kanan, kekalahan proyek-proyek revolusioner di abad lalu serta proses pergantian sistemnya, di setiap regional dunia dan di setiap ruang lingkup kehidupan, dengan menyingkirkan tabir reformasi yang mengkamuflasekan serta merantai kembali sifat progresif pada orde dunia lama. Tentu juga dibutuhkan penggalian dan pembelajaran kembali sejarah-sejarah gerakan di Indonesia yang sempat dihapuskan atau direpresi selama ini.

Dalam mempelajari sejarah Indonesia modern yang selama ini direpresi—yang didominasi oleh sejarah konsolidasi dan emansipasi pekerja yang dimulai oleh Sarekat Islam dan dimapankan oleh PKI—adalah perlu juga untuk memahami oposisi biner Kiri versus Kanan, tentang bagaimana kapitalisme yang dikuasai birokrasi negara adalah oposisi ide sosialismeini adalah fakta yang selalu ditolak oleh Leninis. Sosialisme hanya dapat eksis apabila para pekerja sendiri secara langsung memanajemeni seluruh proses produksinya sendiri yang otomatis menggerakkan seluruh masyarakat. Hal itu yang tidak pernah eksis di negara-negara seperti Bolivia di bawah Evo Morales atau Venezuela di bawah Chavez atau juga dimanapun juga yang mengaku negara sosialis. Revolusi Russia yang membawa Lenin pada kursi kekuasaan dan Revolusi China yang memberi Mao kekuasaan mutlak, hancur, di tingkat pertama adalah karena dikalahkan oleh kekuatan intern mereka sendiri. Model yang diberikan dalam revolusi mereka, tak ubahnya model yang hanya mengakui bahwa kekuatan kapitalisme perlu dibawa pada sebuah keseimbangan, yang tak lain hanya akan mengakui secara penuh bahwa sistem kapitalisme dan imperialisme adalah sebuah kebenaran mutlak.

Perkembangan kesadaran di kalangan publik sesungguhnya cukup cepat. Dalam salah satu perbincangan dengan seorang pekerja saat berlangsungnya demonstrasi penolakan revisi UU 13/2003 di Bandung, pekerja tersebut berkata bahwa pemerintah tidak akan pernah berpihak pada pekerja dan karenanya adalah sia-sia saat demonstrasi selalu diakhiri dengan kolaborasi antara repersentatif pekerja dan representatif pemerintah, atau yang paling sering terjadi adalah dengan diadakannya pertemuan kolaboratif pekerja-pengusaha-pemerintah. “Perubahan tak pernah dapat diambil dengan jalan damai karena pemerintah tidak akan diam saja kekuasaannya diambil alih.”

Kerja: Definisi dan Teori

Kelas pekerja: *mereka yang harus bekerja (menjual tenaga kerjanya) agar mampu melanjutkan hidupnya.*

Definisi dan Teori Dasar Soal Kerja

Berbicara mengenai kerja, artinya kita berbicara mengenai definisi dari kerja itu sendiri. Kerja adalah sebuah aktifitas manusia dalam usahanya memanfaatkan (dengan mengubah atau menyesuaikan) benda-benda material yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, maka kerja menjadi keharusan bagi kehidupan manusia, karena tanpa kerja tak akan ada kehidupan. Kerja ini pula yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang secara pasif harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sementara manusia dengan perkakas yang diciptakannya dapat mempengaruhi serta mengubah alam di sekelilingnya agar sesuai dengan kebutuhannya, atau agar dapat memenuhi bahan-bahan yang dibutuhkannya.

Dalam hal ini, maka kerja juga membutuhkan apa yang disebut dengan obyek kerja. Obyek kerja itu sendiri adalah apa saja yang menjadi sasaran untuk dikerjakan oleh manusia yang diambil langsung dari alam, misalnya besi, batu, kayu, dsb., maupun benda material yang telah dikenai kerja manusia, seperti misalnya dalam pengerjaan sebuah buku maka dibutuhkan obyek kerja berupa kertas (kertas telah dikenai kerja semenjak aslinya ia berupa kayu). Obyek kerja ini sering juga disebut bahan mentah atau bahan baku.

Untuk menghasilan sebuah lingkaran produksi yang utuh, setelah ada obyek kerja dan kerja itu sendiri, maka manusia membutuhkan alat kerja. Alat kerja adalah segala benda yang dipergunakan manusia sebagai perkakas untuk mengenakan kerjanya pada obyek kerja untuk kemudian mengubahnya (dalam hal ini termasuk juga di dalamnya perkakas produksi pertama, maupun juga tanah, bangunan, jalan, dst.) Perkakas produksi ini meliputi bermacam perkakas mulai dari perkakas batu yang kasar di era primitif hingga mesin-mesin modern.

Secara lebih mudahnya, proses produksi (keseluruhan proses kerja hingga menghasilkan sebuah produk) dapat dikatakan sebagai berikut:

obyek kerja (bahan baku) → dikenai kerja dengan alat kerja → produk akhir

misalnya, penerapan konsep tersebut dalam satu bagian pembuatan pakaian di industri clothing:

kain (bahan baku) → dijahit (dikenai kerja) dengan alat jahit (alat kerja) → pakaian (produk akhir)

Obyek kerja dan alat kerja merupakan apa yang disebut dengan alat produksi, dan alat produksi tersebut bila tidak diterapkan dengan tenaga kerja jelas tidak akan berguna sama sekali. Begitu juga sebaliknya, untuk memulai proses produksi tentu tenaga kerja juga mesti mengambil bagian dalam perkakas produksi.

Tenaga kerja itu sendiri adalah kecakapan manusia bekerja; atau keseluruhan kekuatan jasmani dan rohani dengan mana manusia dapat menghasilkan sebuah produksi material.

Penggabungan antara alat produksi dan tenaga kerja disebut tenaga produktif masyarakat. Secara simpelnya:

obyek kerja + alat kerja = alat produksi
alat produksi + tenaga kerja = tenaga produktif masyarakat

yang juga terjebak dalam kontradiksinya sendiri dan hanya mendapat dukungan dari kalangan kelas menengah muslim di Indonesia yang dari segi ekonomi tergolong mapan.

Revolusi berikutnya dihadapkan pada tugas untuk memahami diri mereka sendiri, kepentingan mendasar mereka sendiri yang tak mungkin dapat dipenuhi hanya oleh diri mereka sendiri. Mereka harus menciptakan bentuk relasinya sendiri dan melawan segala bentuk upaya kooptasi yang dipersiapkan untuk mereka. Pemogokan-pemogokan dan kerusuhan di Bolivia (yang mulai berlangsung secara intens sejak tahun 2000) yang menggembar-gemborkan akhir dari neo-liberalisme tidak mengindikasikan masa depan Bolivia selain hanya memberikan sebuah pilihan: pemerintahan diktator yang terang-terangan menjadi boneka Amerika, atau pemerintahan Evo Morales yang mengaku Kiri tapi tetap berjalan selaras dengan kepentingan ekonomi Amerika, atau aspek-aspek paling radikal dari momen-momen kebangkitan yang direpresentasikan oleh Komune El Alto yang merealisasikan sosialisme tanpa label 'sosialis'.

Arus revolusioner saat ini, dimanapun ia muncul, harus bermula dengan menjalin hubungan dengan pengalaman-pengalaman para oposan sistem saat ini dan dengan orang-orang yang menjadi oposan tersebut. Dan saat membentuk jaringan di antara beberapa grup, di saat yang sama jaringan tersebut harus membangun juga basis koheren dari proyek-proyek mereka. Tentu saja, basis yang koheren tersebut harus dibangun untuk menyikapi dan menyerang dunia ini secara menyeluruh, sehingga ia dapat membangun gerakan-gerakan baru yang merupakan negasi modern dari sistem kapitalisme lanjut yang telah menyeluruh ini. [ ]

Pop Quiz 01.1

"Agus sendiri pada 13 Maret 2002 ditangkap bersama Jamal Balfas dan Tamsil Linrung di bandara Manila de-ngan tuduhan membawa bahan peledak. Tamsil, penasihat Komite Syariat dan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dibebaskan sebulan kemudian bersama Jamal. Sedangkan Agus hingga kini masih mendekam di tahanan Filipina."

"Bukan hanya Komite Syariat yang bergerak. Juru bicara Majelis Mujahidin Indonesia, Fauzan al-Anshari, juga mengakui saat ini organisasinya getol memasyarakatkan peraturan anti-maksiat ke berbagai daerah. "Saya kebagian menggarap wilayah Jawa Barat," kata Fauzan. Cara yang dipakai tidak hanya melalui lembaga legislatif atau eksekutif, tapi juga pendekatan melalui individu."

—Syariat Islam di Jalur Lambat (http://www.tempointeraktif.com/hg/mbmtempo/free/nasional.html)

KASUS 1:
Bom yang diledakkan di Bali, Hotel Marriot, yang diakui oleh Imam Samudera sendiri dalam bukunya, adalah sebuah aksi teror. Atas nama penegakkan syariah ia menyebar ketakutan pada publik.

KASUS 2:
Perda Tangerang telah diberlakukan, dan juga akan diberlakukan di berbagai provinsi di Indonesia. Depok telah memberlakukannya, Bandung dan kota lain menyusul setelah representatif PKS di tiap daerah berusaha menggolkan aturan tersebut. Pemberlakuan di Tangerang membuat setiap perempuan yang masih berada di luar rumah di atas pukul 7 malam dapat diasumsikan sebagai pelacur (tergantung prasangka dari para Pamong Praja yang melakukan penangkapan). Perempuan yang bekerja di (dan hingga) malam hari telah banyak menjadi korban penangkapan. Atas nama penegakkan syariah Perda tersebut menyebar ketakutan pada publik terumata kaum perempuan.

PERTANYAAN:
Apakah persamaan dari dua kasus di atas?

Momen Dunia Baru di Bolivia

Kebangkitan popular di Bolivia adalah sebuah even yang sangat indah sejak kebangkitan di Argentina yang dimulai pada tahun 2001. Ia mengguncang seluruh kelas penguasa di dunia dan mengekspos kerapuhannya. Rezim-rezim di Amerika Latin seakan diberi alarm sebagaimana juga pemerintah Amerika Serikat (AS) yang berniat menanamkan modal besarnya di sana. Birokrasi Venezuela yang diagung-agungkan oleh kelompok Kiri internasional tertangkap basah dalam wajah buruknya: Hugo Chávez mendukung presiden terpilih dari kelompok sayap Kiri Bolivia, Evo Morales, yang berarti mengkontradiksikan dirinya sendiri dengan melawan aspirasi publik (semenjak Morales menampakkan identitas aslinya yang lebih berpihak pada kepentingan para pemodal AS yang dulu sering disebutnya sebagai "imperialis"). Fidel Castro, yang memimpin birokrasi Kuba, tidak membuka mulut sama sekali mengenai represifitas militer di bawah Morales terhadap para pekerja yang mogok karena menolak privatisasi, ia tampak lebih memfokuskan perhatiannya pada pemapanan rezim Kiri yang stabil dan berkebijakan sesuai dengan dirinyamenyoraki kemenangan Morales sebagai kemenangan kelompok anti-neoliberalisme Amerika Latin, dan menuduh siapapun yang menentang pemerintahan tersebut sebagai kelompok pro-imperialis AS. Maka semakin jelas, bahwa pertentangan antara pemerintah Kiri Amerika Latin tidak ada bedanya dengan pemerintah AS yang mereka klaim mereka tentang mati-matian. Semua hadir untuk kepentingan pembentukan ilusi kemerdekaan, bukan kemerdekaan itu sendiri. Menteri Luar Negeri kabinet Morales, David Choquehuanca berkata, "Kami tidak menolak memasuki area pasar bebas Amerika."

Kemungkinan berlanjutnya insureksi popular memang menghantui jajaran birokratis kelompok Kiri otoritarianinilah yang sebenarnya selalu mereka takutkan yaitu kemungkinan kemampuan manajemen diri proletariat yang biasanya akan hadir kala terjadi "vakum kekuasaan" atau situasi "chaos" di Bolivia. Toh gerakan Bolivia secara esensial tidaklah hanya milik kelompok Kiri. Beberapa kelompok yang melakukan pemogokan untuk menentang presiden rezim pro-neroliberal sebelumnya, Lozada dan Mesa, kini menentang Morales dengan kembali menggelar aksi-aksi pemogokan; sang presiden mengatakan pada media massa bahwa para pemogok "hanya membuat situasi semakin memburuk." Momentum dan pengulangan kisah lama tentang pengkhianatan para pemimpin massa telah berhasil mendorong banyak dari kelompok-kelompok revousioner untuk melangkah mempercayakan nasib mereka pada diri mereka sendiri. Aksi pemogokan pekerja bandara udara dalam menolak privatisasi bukanlah sebuah reaksi yang memperparah situasi, bukan pula sebuah aksi yang ditunggangi AS, ini adalah sebuah aksi melawan kebijakan neoliberalisme yang juga ditemukan di tempat-tempat lain dimanapun juga di dunia ini.

Morales, kabinet borjuisnya dan jajaran kemiliteran memiliki, dan masih memiliki, kontradiksi di antara sesama mereka sendiri. Tapi tak ada satupun dari ketiganya yang dapat terus berjalan tanpa dua lainnya. Mengesampingkan retorikanya tentang ketidak setujuan dirinya dengan agenda neoliberalisme, Morales memilih Menteri Keuangannya, Luis Alberto Arce, seorang yang telah lama berkoneksi dekat dengan institusi finansial internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Inter-American Development Bank. Sementara untuk Menteri Pertahanannya, Morales memilih seorang anggota loyal dari kelompok sayap Kanan MNR, seorang loyalis eks-Presiden Losada yang pro neoliberalisme dan berhasil digulingkan sebelumnya, yang juga bertanggung jawab atas pembantaian insurgen di tahun 2003.

Para pemimpin negara dan komentator politik mengira bahwa mereka melihat Bolivia hanya dalam

kemenangan Morales untuk duduk di kursi kepresidenan. Padahal dalam realitanya, semenjak tahun 2002 dimana untuk pertama kalinya menaiki jenjang karirnya sebagai politisi, Morales tidak mendukung ataupun berpartisipasi dalam insureksi popular yang menggulingkan Losada pada bulan Oktober 2003 dan menendang Mesa pada bulan Juni 2005. Maka setelah Morales memenangkan kursi kepresidenan, apakah pulik layak berharap padanya untuk memperbaiki peta kehidupan di Bolivia?

Rasanya tidak karena dimanapun juga pemerintahan, yang mengaku popular sekalipun, tak akan dapat mempertahankan revolusi, semenjak pemerintahan harus mempertahankan dirinya sendiri dari gelombang revolusi. Mohammad Hatta mendiskreditkan para pemuda revolusioner saat Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya; saat menggapai kursi kepemimpinan di Rusia, Lenin menindas penduduk Kronstadt dan kaum Makhnovist setelah ia duduk di kursi pemerintahan; di Chili, pemerintahan Allende menyerang buruh dan tani yang bersenjata dan telah berhasil menduduki pabrik atau lahan pertanian; dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Terlepas dari apakah nanti Morales berhasil membangun kehidupan yang lebih baik di Bolivia atau tidak, pertanyaan paling fundamental di Bolivia bukanlah tentang pengkombinasian berbagai kekuatan yang menggerakkan negara, melainkan tentang apakah para pekerja akan mempertahankan diri dan hidupnya yang untuk sementara telah berhasil direbut oleh para pekerja tersebut.

Apa yang seringkali luput dari perhatian adalah sesuatu yang muncul di El Alto, sebuah bagian penduduk terpadat dan terkumuh dari Bolivia, yang justru di sana telah berhasil dibangun sebuah Komite Publik, yang rencananya akan disebarluaskan melalui berbagai cara pada sebanyak mungkin publik di Bolivia dengan harapan masyarakat dari berbagai sektor akan mulai untuk membangun organisasinya sendiri dengan berdasarkan pada ide-ide manajemen diri. Komite ini bahkan sering juga disebut sebagai “Komune El Alto”. Dibentuk pertama kalinya pada tahun 2003, komite ini mendedikasikan diri bagi pengembangan alternatif yang sesungguhnya bagi sistem saat ini. Komite ini dibentuk dari berbagai grup-grup yang aktif di kota El Alto khususnya dan La Paz (ibukota Bolivia) pada umumnya. Komite ini bergerak dengan mulai mendorong publik untuk mengambil bagian dalam menentukan hidupnya, membangun organisasinya sendiri dan membentuk jaringan antar organisasi. Komite ini pulalah yang menyerukan agar komite-komite sejenis di bangun di seluruh Bolivia sebagai sebuah alternatif, daripada sekedar memberikan seluruh keputusan Bolivia ke tangan pemerintah.

Komite ini sadar, bahwa apabila mereka tidak menyuarakan kepentingan mereka sendiri, maka para birokratlah yang akan bersuara untuk mereka atas kepentingan para birokrat tersebut. Bila mereka tidak mengkomunikasikan pengalaman dan analisa mereka (seperti yang mereka lakukan dengan radio yang telah mereka bangun di sana bernama radio Soberania), maka media massa pro-pemerintah akan terus menyiarkan kabar-kabar yang penuh distorsi. Mereka sadar, bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan revolusi adalah dengan *menyebarkan* bibit revolusioner tersebut. Walaupun seandainya mereka suatu saat akan dikalahkan, setidaknya, mereka telah memberi contoh bahwa ada sebuah alternatif nyata yang sebenarnya mungkin untuk dilakukan dan dijalani.

Setiap kali orang-orang mulai membangun sejarah mereka sendiri, mereka mampu menggali momen-momen terbaik yang pernah terjadi di masa lalu (pertama kalinya, Bolivia tercatat pernah membangun komite-komite publik otonom saat terjadi kebangkitan popular tahun 1974). Komune El Alto, adalah sebuah bentuk dari ekplorasi dan presentasi dari kekuatan publik, dan ia hanya perlu memapankan analisa terkini serta belajar dari kesalahan di masa lalu. Komune El Alto adalah sebuah pembuka, ia hadir melewati seluruh kekacauan sosial, mendorong partisipasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sosial sekaligus jawabannya dalam bentuk yang konkrit. Inilah sebuah awal perubahan sosial yang sesungguhnya. [ ]

Rekomendasi Bacaan

Petras, James. 2006. “A Bizzare Beginning in Bolivia — Inside Evo Morales's Cabinet” *Weekend Edition, February 4th 2006.*

www.narconews.com (untuk berita-berita terkini mengenai situasi sosial politik di Amerika Latin)

Kesadaran ini secara konstan berakumulasi lebih sebagai kekuatan-kekuatan potensial; tetapi para spesialis dan 'manajer gerakan' atas perannya sebagai vanguard yang bertugas menjaga agar perkembangan aktifitas domba-dombanya segaris dengan keinginan dan visinya sendiri, biasanya terpaksa mengabaikan potensi kekuatan yang muncul dan berkembang ini. Saat para pekerja yang tergabung dalam organisasi pekerja SPSI yang berdemonstrasi menuntut pembatalan revisi UU 13/2003 di jalanan Jakarta beberapa hari setelah May Day 2006 memulai aksi kekerasannya—yang sesungguhnya adalah tradisi aksi pekerja itu sendiri—ketua SPSI dalam wawancara di televisi berkata, “Para perusuh itu adalah para pekerja yang tidak mau berkoordinasi dengan kami. Dan kami juga tidak mentolerir tindakan-tindakan 'anarkis' seperti itu.” (Metro TV, 4 Mei 2006). Daripada memihak kepada para pekerjanya sendiri, para elit organisasi lebih sering berbalik memihak pada pemerintah di saat-saat genting di mana taktik mereka dipertanyakan dalam bentuk aksi-aksi di luar garis kebijakan para elit tersebut. Perkembangan kesadaran ini yang seringkali menjadi hancur kembali berkat ketidakpuasan yang muncul akibat represi dan penolakan dari para spesialis tersebut.

Teori revolusioner juga harus berjalan beriring dengan kenyataan yang ada, ia harus tetap berada dekat dengan praksis revolusioner yang hadir atas lahirnya dan berkembangnya kesadaran, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sejarah sendiri sebenarnya hingga saat ini tetap terus mengkonfirmasikan hal ini. Tapi apabila sejarah dirasa tidak pernah secara luas diketahui dan dipahami, ini adalah karena sejarah—bahkan tentang momen-momen revolusi sendiri—ditulis dengan bahasa kekuasaan dan disaring dengan kepentingan birokrasi politik dan ekonomi dominannya. Dalam bahasa tersebut, maka sejarah yang paling revolusioner sekalipun hanya ditransformasikan sebagai sebuah komoditas—sesuatu yang dapat diperjual belikan. Revolusi menjadi ilusi yang dapat dikonsumsi di tengah masyarakat konsumer.

Kesadaran revolusioner yang meletup secara sporadis memang akan selalu ditanggapi dengan pengorganisasian represi secara internasional, yang beroperasi dengan berbagai macam taktik dan strategi. Tujuannya: menggiring kembali mereka yang telah mulai tersadarkan, untuk kembali terlelap pada stabilitas orde dunia lama. Represi yang permanen dan selalu cepat tanggap ini terepresentasikan dalam bentuk intervensi militer (kasus insurgensi Papua versus PT. Freeport belum lama berselang) atau juga dalam bentuk yang lembut (kasus Blok Cepu yang dikuasai oleh ExxonMobil tapi didukung oleh penduduk lokal atas 'pendanaan pengembangan daerah', usaha pembentukan lembaga pekerja-pengusaha-pemerintah dalam kasus protes terhadap draft revisi UU 13/2003 dimana seakan-akan pekerja dilibatkan dalam proses pembuatan sebuah hukum dan UU negara).

Upaya-upaya revolusioner saat ini, seringkali bermula dalam isolasi, bermula dalam satu sektor saja tanpa mengupayakan totalitas masyarakat, dan sekaligus juga tak pernah berusaha menembus sektor-sektor lainnya. Memiliki hanya visi kebebasan bagi sektornya sendiri, mereka menyerang hanya pada sebagian aspek dari sistem yang menyeluruh. Sebagai hasilnya, mereka juga hanya mendapatkan level minimum dukungan publik dan level maksimum represifitas negara dan berbagai tuduhan. Revolusi-revolusi berikutnya, dapat menemukan dukungan penuh dunia hanya dengan cara menyerang dunia ini secara menyeluruh. Gerakan pembebasan Hamas yang diprakarsai oleh penduduk Palestina, bila ingin mendapatkan dukungan penuh dunia, harus mempertanyakan seluruh kontradiksi yang dihadirkan oleh kapitalisme lanjut; ia tak boleh hanya bersanding dengan 'nasionalisme Islam' dan 'kapitalisme Islam'. Pemberontakan di Papua juga demikian, ia tak boleh hanya bersanding dengan 'nasionalisme Papua' saja. Bentuk-bentuk gerakan pembebasan tersebut harus menyadari dan menyerang dunia secara menyeluruh.

Gerakan pembebasan yang dimotori oleh muslim atas nama Islam, biasanya sangat efektif dalam gerak dan popularitas dukungan. Tapi semenjak tiap gerakan tersebut semakin jelas hanya akan berujung dan berakhir dengan ideologi Islam, ia akan mulai menuai kontradiksinya sendiri semenjak nyaris tiap gerakan pembebasan yang berbasiskan pada ideologi-ideologi agama pada waktunya akan berubah menjadi gerakan kontra-revolusioner. Ia harus dapat menjamin kebebasan bagi kelompok masyarakat Ahmadiyah, Kristen dan lainnya. Penangkapan atas aktifis perempuan di Aceh oleh Polisi Syari'ah hanya karena tidak mengenakan jilbab dan bahwa aturan tersebut akan diterapkan termasuk pada mereka yang non-muslim, adalah bukti bahwa pembebasan yang diidamkan oleh masyarakat di Aceh, yang meletakkan basisnya dalam ideologi Islam, telah mulai menuai kontradiksinya sendiri. Persis sama seperti kasus PKS

Tenaga produktif masyarakat ini mencerminkan hubungan manusia dengan benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam yang digunakan untuk memproduksi kekayaan material. Dalam prosesnya, manusia tidak hanya mempengaruhi alam (misalnya eksploitasi atas sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran, limbah, dll.) tapi juga mempengaruhi sesama manusia, karena manusia hanya berproduksi dengan bekerja sama dalam cara tertentu dan saling menukarkan aktifitasnya. Untuk berproduksi, manusia melakukan pertalian timbal balik dan perhubungan tertentu, dan hanya dengan proses ini maka alam juga turut dipengaruhi. Proses yang mempengaruhi alam inilah yang kemudian dinamakan proses produksi.

Pertalian dan perhubungan tertentu antara manusia dan proses produksi adalah apa yang disebut sebagai hubungan produksi. Hubungan produksi ini meliputi bentuk hak milik atas alat-alat produksi, kedudukan kelas-kelas masyarakat, golongan masyarakat dalam produksi dan pertalian timbal balik di antara mereka, dan bentuk distribusi atas hasil produksi.

Karakter hubungan produksi ditentukan pertama kali oleh soal milik siapakah alat produksi. Milik perseorangan (privat), segolongan masyarakat, kelas sosial tertentu, yang lantas hasil produksinya digunakan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, ataukah milik bersama masyarakat, dimana hasil produksinya juga digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.

Dan dalam poin ini, kita semua tahu betul, bahwa di bawah sistem ekonomi kapitalisme, alat produksi dimiliki oleh kelas sosial tertentu dimana hasil produksinya juga digunakan untuk kepentingan kelas sosial tertentu tersebut. Sementara kelas sosial lain berperan dalam penyediaan tenaga kerja, tapi tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati hasil produksi dari kerja yang telah ia lakukan. Kelas sosial pertama, tidak melakukan kerja, tapi menikmati hasil produksi. Kelas sosial kedua, melakukan kerja, tapi tidak menikmati hasil produksi. Dengan demikian secara otomatis, dua kelas tersebut saling bertentangan. Hubungan produksi inilah yang lantas menjadi landasan teoritis mengenai asal usul pertentangan antar kelas (kelas pekerja versus kelas penguasa).

Bagaimana Kerja di Bawah Sistem Kapitalisme?

Setelah kita berbicara mengenai definisi kerja dan bagaimana proses produksi dapat berlangsung serta bagaimana hubungan produksi yang ditimbulkannya (hingga muncul kelas sosial dalam masyarakat), kini kita berbicara mengenai topik yang lebih menarik: pengidentifikasian musuh utama kelas pekerja dalam kerja yang kita lakukan sehari-hari.

Pada tingkat perkembangan tertentu dari hasil produksi (karena hasil produksi lantas memiliki dua nilai: nilai guna dan nilai jual) maka uang yang menjadi alat tukar antar hasil produksi kemudian justru yang menjadi kapital (modal). Tidak seperti yang banyak orang sangka, uang itu sendiri sesungguhnya bukanlah kapital. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata home-industry dimana produsen kecil barang dagangan hidup dari penjualan hasil produksi mereka. Di sini uang berperan sebagai alat pengedar hasil produksi. Hasil produksi yang satu dijual untuk membeli hasil produksi yang lain yang dibutuhkan; nilai guna sebuah hasil produksi ditukarkan dengan nilai guna hasil produksi lain. Prosesnya: *barang* → *uang* →*barang*. Orang menjual untuk membeli. Misalnya, seseorang membeli ponsel karena ia membutuhkan ponsel untuk memudahkan dirinya berkomunikasi (sesuai dengan nilai guna ponsel tersebut).

Sementara, uang menjadi kapital saat uang yang dimiliki dalam setiap proses jual beli menjadi target pertambahan (akumulasi). Prosesnya tidak lagi *barang* → *uang* → *barang*, tapi menjadi *uang* → *barang* → *uang*. Dalam hal ini, apabila proses pertukaran di atas tadi uang sekedar menjadi nilai guna (sebagai alat pengedar hasil produksi), maka kini uang menjadi kapital, dimana proses dasarnya: *uang* → *barang* → *uang+profit*. Orang membeli untuk menjual. Misalnya, seseorang membeli ponsel bukan karena ia membutuhkan ponsel tersebut, tapi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi (di sini ponsel tidak memiliki nilai guna lagi).

Ini yang dinamakan sistem ekonomi kapitalis (sistem ekonomi yang bertujuan melipat gandakan kapital/modal). Sebagai catatan, jangan campur adukkan sistem ekonomi ini dengan proses pertukaran hasil produksi atau jual beli, karena sejarah membuktikan bahwa tidak semua sistem ekonomi adalah sistem ekonomi kapitalis.

Melampaui Imaji Revolusi

Kolapsnya imaji perubahan yang direpresentasikan oleh 'pemerintahan demokratis' SBY-JK mengambil tempat sebagai sebuah pengejawantahan lain dari 50 tahun kolapsnya demokrasi itu sendiri di Indonesia, yang dimulai sejak masa kepemimpinan rezim pertama di Indonesia, Sukarno-Hatta. Kali ini juga dengan menggunakan taktik yang telah berulang kali digunakan 50 tahun tersebut: kebohongan birokratik—yang menjadi suplemen dari kebohongan birokratik yang permanen. Usaha JK mendiskreditkan gerakan pekerja dalam ucapannya beberapa hari sebelum May Day 2006, "May Day adalah tradisi pekerja di negara-negara komunis, dan sebaiknya pekerja Indonesia tidak perlu ikut-ikutan merayakannya," (Metro TV, 29 April 2006) terbukti tak digubris. May Day 2006 tetap berjalan mulus, dan usaha klarifikasi kebohongan JK yang di malam 1 Mei 2006 menyatakan terima kasih pada para pekerja karena tak melakukan tindak kekerasan dalam perayaan May Day, sudah tak memiliki arti lagi dan malah semakin memperjelas sosok sesungguhnya JK.

Sejarah modern Indonesia mengikutsertakan wacana revolusioner, yang sayangnya menjadi target pemusnahan sejarah besar-besaran oleh pemerintah pasca kudeta tahun 1965 yang dilancarkan oleh kubu Suharto-A.H. Nasution. Semenjak tahun tersebut, dimana-mana masih meletup konfrontasi sosial, tapi tak pernah sekalipun orde dunia lama dapat benar-benar dihancurkan, bahkan dalam diri kekuatan sosial sendiri yang mengklaim menjadi musuhnya. Di mana-mana ideologi orde dunia lama dikritisi dan ditolak, tapi jarang sekali hadir kekuatan sosial yang mengakhiri kondisi nyata yang eksis, yang terbebas dari 'ideologi' yang satu atau yang lain yang hanya melayani kepentingan kekuasaan. Revolusioner ada di mana-mana, tapi di manapun tak pernah hadir revolusi yang sesungguhnya: termasuk revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang sama sekali bukan revolusi—karena hanya menggantikan kekuasaan dominan negara lain dengan kekuasaan dominan oleh segelintir pribumi.

Bagi mereka yang memperhatikan, imaji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendominasi benak banyak muslim di Indonesia telah menampakkan wajah sebenarnya. Dalam masa kampanye PKS, mereka merepresentasikan diri sebagai kekuatan alternatif di tengah momen di mana kekuatan Islam yang dipandang sebagai kekuatan alternatif, berdiri berimbang dengan Islam yang dipandang sebagai kekuatan reaksioner, dalam menyikapi globalisasi modal di Indonesia. Pasca Pemilu 2004, PKS yang tak berhasil memenangkan Pemilu tetap berhasil menempati banyak posisi penting dalam pembuatan peraturan negara. Ini juga adalah saat di mana takdir kelas borjuis menunjukkan kembali sifat alamiahnya. PKS mulai mengusulkan aturan-aturan baru yang bertujuan untuk menempatkan seluruh penduduk Indonesia di bawah kontrol yang ketat: digulirkannya pertama kali RUU APP oleh representatif mereka, dan didesakkannya pemberlakuan Perda anti-pelacuran a la Tangerang di kota Bandung oleh jajaran representatif kota Bandung yang didominasi PKS.

Tentu saja, saat ia hadir dengan menggunakan label Islam dan mengambil posisi berseberangan dengan Islam garis keras a la Imam Samudra, maka otomatis nyaris seluruh dukungan muslim berpihak pada mereka. Dalam kenyataannya, PKS justru merangkul kontradiksinya sendiri, ia sama sekali tak bertindak saat kekuatan garis keras beraksi (penyerangan-penyerangan kaum muslim terhadap kaum muslim Ahmadiyah dan aktifitas FPI yang penuh kekerasan). Justru di tengah kondisi demikian, PKS tetap sibuk dengan kampanye moralnya. Termasuk saat isu-isu anti pekerja (revisi UU 13/2003) digulirkan oleh pemerintah, dalam May Day 2006 kali ini, mereka justru sama sekali tidak ambil bagian dalam demonstrasi dan aksi protes (tahun-tahun

PELAJARAN DARI KUDETA BONAPARTE TAHUN 1851

Brumaire XVIII Louis Bonaparte
Karl Marx
Hasta Mitra 2006, Rp. 21.000

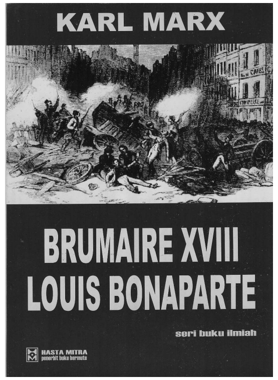

Tanggal 2 Desember 1851, para pengikut Presiden Louis Bonaparte (kemenakan Napoleon Bonaparte) membubarkan Majelis Legislatif dan mendirikan suatu kediktatoran. Setahun kemudian, Louis Bonaparte memproklamirkan dirinya sendiri sebagai kaisar Napoleon III. Ini adalah gambaran mengenai momen kelanjutan dari perang sipil di Perancis abad 19 yang menandai berakhirnya masa feodalisme di Barat. Toh kelanjutan dari sebuah revolusi memang tak selalu bersifat revolusioner, seringkali ia hanyalah sebuah aksi pengulangan tentang perpindahan kekuasaan dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya saja. Dalam masa tersebut ada 3 buah karya penting yang menyoroti kasus bersejarah tersebut, Victor Hugo dengan karyanya yang berjudul 'Napoleon the Little', Pierre Joseph Proudhon dengan 'Coup d'Etat' dan terakhir, buku ini, yang ditulis oleh Karl Marx antara Desember 1851 hingga Februari 1852.

Kelemahan Vitor Hugo adalah bahwa dalam proses kritiknya, secara ironis ia justru menempatkan Napoleon justru sebagai individu yang hebat. Sementara Proudhon, sang anarkis, seperti juga mayoritas anarkis lainnya, terjebak dalam kemiskinan pemahaman sejarah dan peran-peran antar kelas sosial yang saling bertentangan. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengglorifikasikan, karya Marx hadir sebagai pelengkap (apabila tidak dapat disebut sebagai pengkritisi) dua karya tersebut.

Terbagi dalam 6 bab, dalam buku ini Marx memulainya dengan era berakhirnya masa revolusioner di Perancis (yang didominasi oleh kaum pedagang yang menolak negara turut campur dalam proses bisnis, sehingga revolusi ini juga seringkali disebut sebagai revolusi kaum borjuis). Dalam bab pertama, Marx mendeskripsikan dengan jelas para tokoh-tokoh penting yang berpengaruh besar dalam revolusi tersebut seperti Robespierre, Louis Blanc maupun Blanqui, lengkap dengan latas belakang tiap-tiap tokoh yang juga mempengaruhi pola-pola pengambilan keputusan dan aksi-aksinya. Dengan memahami tiap tokoh, kita dapat dengan lebih mudah mengikuti gerak sejarah yang terjadi tersebut dan memahami tentang bagaimana revolusi borjuis secara kontras bergerak berbeda arah dan tujuan dengan gerak sosial politis proletariat. Tema utama yang diketengahkan Marx dalam bab pertama ini dengan jelas dapat kita lihat, perbedaan dan pertentangan antara borjuis dan proletariat.

Mengesampingkan dulu kenyataan-kenyataan bahwa tiap kebangkitan revolusioner seringkali hanya menampilkan tokoh-tokoh baru yang tak berbeda dengan dunia lama, dalam bab 2, kesalahan-kesalahan langkah dari gerak proletariat berusaha dianalisa dan dipaparkan. Selanjutnya, secara lebih mendalam dipaparkan dalam bab 3 tentang apa yang sebelumnya telah merekatkan para borjuis kecil dan pekerja dalam satu barisan dan tentang bagaimana proletariat harus membayar mahal atas seluruh kerjasama yang telah mereka lakukan. Tema utama dalam bab 2 adalah Bonapartisme dan arti kebebasan itu sendiri.

Bab 3 berbicara mengenai hal-hal apa yang melatar belakangi naiknya Bonaparte ke kursi kediktatoran, dan tentang peranan institusi legal di tengah kancah revolusioner yang belum padam. Di sini kita dapat memahami tentang dialektika sejarah melalui kasus ini sebagai contohnya. Bab 4 menyoroti tentang bagaimana demokrasi borjuis dilaksanakan hingga kejatuhannya. Pertentangan kelas dan arti dari demokrasi borjuis digambarkan dengan sangat kentara di sini. Bab 5 yang berbicara mengenai lumpuhnya kekuasaan atas tindak-tanduk Bonaparte yang mulai mengambil alih kontrol atas kekuatan tentara dan menyusun kekuatannya sendiri. Marx di sini secara jelas juga membahas mengenai basis kelas sosial Bonaparte dan tentang bagaimana status tersebut tetap dipertahankan. Hal ini memperkuat premis Marx bahwa latar belakang kelas sangat berpengaruh pada karakter seseorang, yang otomatis juga akan berpengaruh pada seluruh gerak langkah orang tersebut.

Bab 6 sesungguhnya adalah sebuah bukti yang memperkuat premis Marx tentang karakteristik kelas dan bahwa hal tersebut tidak terjadi mendadak begitu saja, tapi ia adalah bentukan dari sebuah urutan sejarah yang panjang dan berbagai kejadian yang menyertainya—seperti bahwa kekisruhan di Perancis

Momen Repetitif

“Tuntutan kaum pergerakan ini sebagai tuntutan-tuntutan gila dari nasionalisme Timur; tentang kesatuan kerajaan Belanda tidak dapat didiskusikan; tidak terdapat rakyat Indonesia; kekuasaan Belanda adalah semen hingga Nusantara tetap dapat bersatu; bahwa kesejahteraan bagi semua yang tinggal di Hindia dapat ditingkatkan hanya apabila kepentingan Belanda dipertahankan dan pengaruh-pengaruh merusak harus sejak semula dicegah.”

Kalimat di atas adalah ucapan dari kelompok Vaderlandse Club, pro-kolonial Belanda pada tahun 1928, saat Indonesia secara resmi belum hadir dan Nusantara masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kalimat tersebut diucapkan atas aksi-aksi pemberontakan yang berupa pemogokan besar-besaran di Jawa oleh buruh kereta api tahun 1926, sabotase-sabotase terhadap kinerja pemerintah, dan pengorganisiran penduduk untuk melawan pemerintah. Kini, nyaris seabad setelahnya, coba kita ganti kata kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia; maka kalimatnya setidaknya akan berubah menjadi seperti berikut:

“Tuntutan kaum pergerakan ini sebagai tuntutan-tuntutan gila dari nasionalisme Timur; tentang kesatuan Republik Indonesia tidak dapat didiskusikan; kekuasaan Indonesia adalah semen hingga Nusantara tetap dapat bersatu; bahwa kesejahteraan bagi semua yang tinggal di Hindia dapat ditingkatkan hanya apabila kepentingan Indonesia dipertahankan dan pengaruh-pengaruh merusak harus sejak semula dicegah.”

Yusuf Kalla, sang wakil presiden Republik Indonesia, belum lama ini dalam wawancaranya menanggapi aksi protes pekerja kerah biru yang berbuntut perusakan di Jakarta, seperti disiarkan dalam Metro TV, menyatakan:

“Pemogokan-pemogokan kaum buruh di Indonesia menentang aturan hukum ini hanya akan merusak dan merugikan kita semua. Apalagi kalau sampai melakukan perusakan. Pengaruh-pengaruh yang merusak ini seharusnya sejak semula dicegah.”

Perhatikan persamaan-persamaannya dari seluruh ucapan tersebut. Respon dari pemerintah apabila kita jeli, hanyalah sebuah pengulangan dari ucapan-ucapan dan pandangan pemerintah sebelumnya. Dan respon yang sama, biasanya adalah reaksi dari sebuah kejadian yang juga sama berulang.

Tragisnya, event May Day tahun 2006 di Bandung, adalah juga sebuah momen pengulangan dari apa yang semakin menjadi klise: para pekerja kerah biru dari berbagai perusahaan memadati jalanan dan area depan gedung DPRD Bandung dengan digiring dalam sebuah barisan yang 'dipagari' dengan tali rafia yang dalam tiap-tiap sudutnya ditempatkan 'anjing penjaga' (biasanya mereka yang bukan pekerja kerah biru) untuk tunduk mengikuti seseorang yang memegang erat megaphone di barisan terdepan (biasanya ini juga bukan dari kalangan pekerja kerah biru sendiri). Pekerja kerah biru berperan sebagai 'domba', mahasiswa yang berjaga sebagai 'anjing gembala', sang aktifis yang memegang megaphone sebagai 'gembala'. Tak ada yang berubah. Barisan demonstrasi menutup diri dan sama sekali tak membuka kemungkinan bagi para demonstrannya untuk bersosialisasi bersama publik. Semua harus ada dalam barisan dan berlaku sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pembawa megaphone. Lebih membosankannya lagi, adalah apa yang disampaikan melalui megaphone, apabila tidak slogan-slogan klise (seperti teriakan “Imperialisme!” yang lantas dijawab oleh para pekerja dengan “Hancurkan!” yang diulang-ulang), maka yang diucapkan adalah orasi yang tak kalah klise (seperti “bagaimana para pekerja kerah biru ditindas”,